



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LKPJ

(LAPORAN KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN)



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah empat belas kegiatan dengan 27 sub kegiatan, untuk realisasi anggaran ada satu sub kegiatan dibawah 80 % yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena tidak sesuai perencanaan anggaran dengan pembayaran sebenarnya sehingga adanya kelebihan anggaran dan untuk pencapaian realisasi target kegiatan semuanya tercapai sesuai dengan yang direncanakan, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian Tabel 3.1.1.

3.1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.222.994.993	4.113.681.692	3.862.239.393	93,89	1. Merekomendasikan segera percepatan peresmian balai latihan kerja (BLK) Kabupaten Pasaman Barat, dengan peresmian lembaga tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan calon tenaga kerja agar dapat bersaing di era globalisasi saat sekarang ini. 2. Kabupaten Pasaman Barat memiliki puluhan perusahaan asing dan penanaman modal dalam negeri yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja juga terdapat tenaga kerja asing, untuk itu direkomendasikan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.872.615.948	3.617.126.427	3.400.418.499	94,01	
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.685.507.948	3.467.518.427	3.251.660.499	93,77	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.308.000	148.808.000	147.958.000	99,43	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	800.000	800.000	100,00	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.454.000	254.000	254.000	100,00	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.200.000	0	0	0,00	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	254.000	254.000	254.000	100,00	untuk dapat melaksanakan pengawasan rutin keberadaan dan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.060.000	37.538.000	35.100.000	93,51	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.060.000	37.538.000	35.100.000	93,51	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.902.150	311.284.550	307.143.656	98,67	Hasil tindaklanjut DPRD: 1. Telah dilaksanakan peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanggal 23 Juni 2022 dan telah dilakukan pelatihan sebanyak 2 paket yaitu pelatihan kelistrikan dan pelatihan otomotif atau perbengkelan dengan jumlah masing – masing peserta sebanyak 16 orang.
				Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.572.000	7.572.000	7.538.000	99,55	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.771.200	67.515.600	67.366.100	99,78	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.780.300	19.695.400	19.288.100	97,93	
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.217.000	30.217.000	30.001.500	99,29	2. Telah dilakukan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	Rp	%	
1				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.561.650	186.284.550	182.949.956	98,21	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilakukan pengawasan secara rutin, pengawasan bersama Tim Pora telah dilakukan sebanyak 2 kali dan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan sebanyak 4 kali.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.050.495	79.181.315	57.622.538	72,77	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.235.000	16.810.000	16.417.000	97,66	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.015.495	55.171.315	35.005.538	63,45	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.800.000	7.200.000	6.200.000	86,11	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.912.400	68.297.400	61.700.700	90,34	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.647.400	27.647.400	22.007.000	79,60	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
	2	3	4	5	6	7	Rp	%	
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	23.385.000	22.185.000	21.668.700	9	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.880.000	18.465.000	18.025.000	97,62	
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	411.202.350	587.000.200	561.904.630	95,72	
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	389.020.750	564.818.600	542.738.980	96,09	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	369.459.150	545.257.000	524.615.980	96,21	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	19.561.600	19.561.600	18.123.000	92,65	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.181.600	22.181.600	19.165.650	86,40	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.181.600	22.181.600	19.165.650	86,40	
				Program Penempatan Kerja	363.742.250	387.850.150	376.820.012	97,16	
				Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota	314.970.150	314.965.650	308.264.100	97,87	
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	28.821.950	28.821.850	26.150.800	90,73	
				Perluasan kesempatan kerja	286.148.200	286.143.800	282.113.300	98,59	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	48.772.100	72.884.500	68.555.912	94,06	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
	2	3	4	5	6	7	Rp	%	
1				Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	26.000.000	32.502.500	31.816.250	97,89	10
				Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	22.772.100	40.382.000	36.739.662	90,98	
				Program Hubungan Industrial	74.673.500	89.450.050	85.262.250	95,32	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.637.800	61.049.850	58.019.300	95,04	
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	7.902.500	7.902.500	7.243.500	91,66	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
	2	3	4	5	6	7	Rp	%	10
1				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.735.300	53.147.350	50.775.800	9	95,54
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogol Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	26.035.700	28.400.200	27.242.950	95,93	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.035.700	24.135.700	23.363.950	96,80	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0	4.264.500	3.879.000	90,96	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	PAGU ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
					6	7	Rp	%	
1	2	3	4	5			8	9	10
2	Transmigrasi		UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans migrasian	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	24.417.100 24.417.100 24.417.100	19.857.100 19.857.100 19.857.100	18.162.600 18.162.600 18.162.600	91,47 91,47 91,47	
				JUMLAH	4.097.030.193	5.197.839.192	4.904.388.885	94,35	

3.3 Kebijakan Strategis yang Diterapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel 3.3.3 sebagai berikut:

No	Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatkan penempatan tenaga kerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan	Untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja
2	Peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pemagangan standarisasi kompetensi dan pengembangan	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan	Meningkatkan kualitas tenaga kerja
3	Peningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan	Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan
4	Peningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi	UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans migrasian	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Merekomendasikan segera percepatan peresmian balai latihan kerja (BLK) Kabupaten Pasaman Barat, dengan peresmian lembaga tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan calon tenaga kerja agar dapat bersaing di era globalisasi saat sekarang ini.	Telah dilaksanakan peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanggal 23 Juni 2022 dan telah dilakukan pelatihan sebanyak 2 paket yaitu pelatihan kelistrikan dan pelatihan otomotif atau perbengkelan dengan jumlah masing – masing peserta sebanyak 16 orang.	1. Untuk meningkatkan skil atau kemampuan pencari kerja agar dapat mencari kerja sesuai ilmu yang dimiliki. 2. Untuk meningkatkan kinerja dan kegiatan pada dinas Tenaga Kerja Kab. Pasaman Barat. 3. Untuk meningkatkan semangat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan 4. Dapat mengurangi angka
2.	Kabupaten Pasaman Barat memiliki puluhan perusahaan asing dan penanaman modal dalam negeri yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja juga terdapat tenaga kerja asing, untuk itu direkomendasikan untuk dapat melaksanakan pengawasan rutin keberadaan dan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku.	Telah dilakukan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilakukan pengawasan secara rutin, pengawasan bersama Tim Pora telah dilakukan sebanyak 2 kali dan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan sebanyak 4 kali.	1. Untuk menertibkan keberadaan dan legalitas tenaga kerja sesuai peraturan yang berlaku 2. Untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan asing